

Interaksi Cina dengan ASEAN: Antara Kepentingan Nasional vs Identitas Bersama

Peni Hanggarini

*Pengajar Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Paramadina*

ABSTRACT

China's interaction with Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has been mutually beneficial for both parties particularly in pursuing their economic and security interests. This interaction resulted in engagement which can be explained through different perspectives of International Relations. This essay attempts to explore China's engagement in ASEAN security cooperation. It discusses to what extent Realist perspectives could explain China's security engagement in ASEAN. Given the fact that China-ASEAN relations has been growing, therefore, it is important to analyze whether this can be maintained in the ASEAN Security Community era. This study has proved that since ASEAN can be explained by Realist and also by Constructivist perspectives, therefore China's interaction in ASEAN could also be explained using these lenses. China's interaction with ASEAN has somewhat constructed an evolving China's security identity among its Southeast Asian counterparts. It builds a constructive framework for a solid interaction between China and ASEAN security community in the post ASEAN Charter. However, Realist argument of 'material interests driven' are more tangible in explaining China's motives for its interaction with ASEAN rather than Constructivist argument of 'shared identity interest driven'.

Keywords: *China, ASEAN, realist, constructivist*

Cina sebagai negara dengan kekuatan populasi terbesar di dunia memiliki potensi yang besar pula untuk menggerakkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik yang besar pula di dalam sistem internasional. Berdasarkan sensus pada November 2000, jumlah populasi Cina tercatat sebesar 1,295 miliar. Angka tersebut

menunjukkan bahwa Cina memiliki sumber daya manusia yang potensial untuk dikelola sebagai modal perekonomiannya. Meski memiliki potensi *power* besar, namun Cina tetap menjalin kerjasama ekonomi dan keamanan dengan negara lain untuk mengejar kepentingan di tingkat kawasan. Kebutuhan kerjasama didorong dari faktor lingkungan eksternal Cina, yaitu globalisasi serta dari adanya transformasi faktor lingkungan domestik politik dan ekonomi Cina.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) telah menjadi salah satu instrumen politik luar negeri Cina dalam mengejar kepentingan ekonomi dan keamanannya di kawasan Asia Tenggara. Instrumen ini digunakan Cina sejak negara ini memutuskan untuk membuka dirinya kepada ASEAN.

Hingga sekitar 1980-an, Cina adalah satu-satunya negara di Asia yang berorientasi kepada negara maju, bukan kepada negara tetangganya di kawasan. Cina juga merupakan satu-satunya negara dunia ketiga yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap menjaga jarak ini antara lain ditunjang oleh aspek historis Cina yang mengarahkan kepada ketatnya kontrol yang dilakukan pemerintah terhadap hubungan dengan negara lain. Namun, transformasi terhadap sikap ini kemudian muncul ketika Perang Dingin usai (Yahuda 1996, 186-211).

Meskipun telah memiliki hubungan bilateral yang baik dengan beberapa negara anggota ASEAN, Cina tidak memiliki hubungan yang erat dengan ASEAN sebelum era 1990-an. Pada 1991, Cina menjadi *Consultative Member* di ASEAN dan pada 1996, ASEAN secara resmi menjadikan Cina sebagai mitra dialog pada 29th ASEAN Ministerial Meeting di Jakarta. Pada awal 1997, lima kerangka dialog terjalin antara ASEAN dengan Cina, yakni China-ASEAN Political Consultation, China-ASEAN Joint Committee on Economic and Trade Cooperation, ASEAN-China Joint Cooperation Committee (ACJCC), China-ASEAN Joint Committee on Scientific and Technological Cooperation, dan ASEAN Beijing Committee. Pertemuan konsultasi juga dilakukan Cina pada ASEAN Regional Forum (ARF), the Post Ministerial Conference (PMC) 9+1, the Joint Cooperation Committee (JCC) Meeting, ASEAN-China Senior Official Meeting (SOM) dan ASEAN-China Business Council Meeting (Swee-Hock 2005, 1-2).

Keuntungan ekonomi tentu dapat diperoleh melalui kerjasama Cina dengan ASEAN. Menurut Swee-Hock (2005, 3), perdagangan antara Cina dengan ASEAN tergolong menjalani perkembangan yang sangat cepat dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 20,8 persen sejak 1990 hingga 2003. Hingga 2005, ASEAN menjadi mitra kerjasama kelima terbesar bagi Cina. Sedangkan Cina merupakan mitra kerjasama keenam bagi ASEAN. Investasi ASEAN di Cina meningkat rata-rata sekitar 28 persen sejak 1991 hingga 2000. Walaupun investasi Cina ke ASEAN masih terhitung sedikit, namun hingga 2001 jumlah investasi tersebut adalah sekitar 7,7 persen dari seluruh investasi Cina di luar negeri. Pada ASEAN-China

Summit November 2001, China mengusulkan ide pembentukan China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA).

Selain keuntungan ekonomi, keuntungan keamanan juga dapat diperoleh dalam interaksi Cina dengan ASEAN. Interaksi Cina-ASEAN dalam hal keamanan diawali pada Desember 1997. President Cina Jiang Zemin bertemu muka dalam pertemuan informal kepala Negara (ASEAN+1) dan merancang *joint statement*. Sejak 1999 hingga 2000 China telah menandatangani kerangka kerja dokumen dalam kerjasama bilateral dengan seluruh negara anggota ASEAN. Kerjasama dalam *transnational non traditional security threats* terutama dalam hal *drug trafficking* terwujud dalam Beijing Declaration pada Agustus 2001 antara Cina, Laos, Myanmar dan Thailand. Hal ini diikuti dengan penandatanganan Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the field of Non Traditional Security Issues. Pada 2003, Cina menandatangani ASEAN Security Protocol yang penting yaitu The Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Kerjasama dengan masing-masing negara anggota ASEAN dilakukan dengan kunjungan antara pemimpin militer, pelatihan militer dan bantuan persenjataan, teknologi militer dan kunjungan pelabuhan (Swee-Hock 2005, 2-3).

Beragam kerangka kerjasama antara kedua belah pihak didasari oleh kepentingan yang hendak dikejar oleh kedua belah pihak. Menurut catatan Swee-Hock (2005, 17), ASEAN membutuhkan kerangka ASEAN+3 melalui kemitraan dengan Cina, Jepang dan Korea guna mengejar sasaran strategis. ASEAN+3 diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih beragam dan lebih besar bagi ASEAN guna mendorong pertumbuhan. Adanya ASEAN+3 dapat mendorong negara anggota ASEAN untuk meningkatkan nilai kompetitifnya melalui reformasi pasar yang lebih besar dan terbuka. Selain itu, dengan hal ini maka akan mendorong paradigma baru bagi kebangkitan Cina yang damai sehingga kawasan Asia Timur lebih kondusif bagi perdamaian dan stabilitas juga mencegah adanya konfrontasi antara Cina dan AS dalam jangka panjang. Di sisi lain, Cina pun menyadari bahwa lingkungan kawasan yang damai dan stabil dapat membantunya untuk berkonsentrasi dalam pembangunan. Cina berharap agar ASEAN+3 dapat menjadi pilar dari regionalisme Asia Timur.

Seperti dikemukakan oleh Wang (2005, 18), kemajuan interaksi antara Cina dengan ASEAN terlihat pada November 2001 ketika keduanya membentuk *free trade area* (FTA) dalam periode 10 tahun. Pada November 2002, ASEAN-China Summit di Phnom Penh, Kamboja, pemimpin ASEAN dan PM Cina, Zhu Rongji menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation sebagai landasan bagi ASEAN-Cina untuk menyelenggarakan FTA. Perjanjian ini mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2003, namun FTA baru akan diberlakukan mulai 2010 dengan negara anggota lama ASEAN terlebih dahulu yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

Sedangkan FTA lain dimulai pada 2015 antara Cina dengan anggota baru ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Selain itu, dalam catatan ASEAN Secretariat, kemajuan kerjasama ini juga diikuti dengan ditandatanganinya kesepakatan Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues pada pertemuan tersebut.

Dengan demikian, baik ASEAN maupun Cina sebenarnya telah sama-sama memiliki potensi keuntungan ekonomi apabila keduanya senantiasa menjaga interaksi yang positif dalam wujud kerjasama. Namun, bagaimana dengan potensi keuntungan bagi kedua belah pihak dalam konteks kerjasama keamanan Cina-ASEAN? Apakah dalam kerangka kerjasama keamanan, Cina mengejar kepentingan keamanan nasional dan keamanan kawasannya dengan melibatkan kekuatan militer? Apakah motivasi keterlibatan Cina dalam kerjasama keamanan ASEAN hanya dapat dipahami dengan perspektif realis?

Kerjasama keamanan Cina dengan ASEAN tidak saja fokus kepada kepentingan keamanan maritim Cina di Selat Malaka. Telah terjalin sembilan bentuk kerjasama keamanan maritim antara keduanya yaitu dalam *maritime security dialogue, consultation on shipping security, maritime anti-terrorism operation, maritime search and rescue, building up maritime military communication channels, marine environment protection, joint law enforcement against transnational crimes, joint military exercises and regional peace keeping operations* dan *humanitarian assistance*. Inti kerjasama diarahkan kepada kerjasama anti teroris dan pembukaan saluran komunikasi militer yang melibatkan juga track II diplomasi yaitu aktor non-pemerintah. Swee-Hock (2005, 10) berpendapat bahwa dalam kerjasama keamanan antara China dengan ASEAN, telah dikembangkan enam prinsip utama yaitu *mutual respect, mutual recognition of interests, mutual trust and mutual benefit, equal negotiation and coordination, effectiveness and steady advancement*.

Lahirnya ASEAN Charter pada 15 Desember 2008 yang mengarah kepada visi *ASEAN for the people*, merupakan tantangan bagi ASEAN dan juga bagi Cina untuk mempertimbangkan kembali arah interaksi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. ASEAN Charter meskipun diarahkan kepada masyarakat (*people centered*) namun prinsip ini masih sekedar visi belum benar-benar terwujud. *Charter* tersebut masih terkesan *state centric* karena menurut Lawansiri (*The Jakarta Post*, 4 Desember 2008) isinya disusun oleh elite pemerintah, tidak melibatkan masyarakat.

Dalam bagian awal tulisan ini, diuraikan keterlibatan Cina dalam kerjasama keamanan ASEAN berdasarkan perspektif realis. Sebagaimana yang dianut oleh realis, asumsi *self-help* menjadi penting dalam mempertahankan kelangsungan kepentingan suatu aktor. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah dengan

melakukan kerjasama yang menurut neorealis tetap harus memiliki keuntungan yang dihitung dalam terminologi *relative gain*.

Motivasi keterlibatan aktor yang memiliki *power* besar seperti Cina dalam ASEAN sangat jelas dirumuskan melalui perspektif realis. Namun, dengan adanya evolusi pada perspektif keamanan yang kini semakin meluas tentu saja kerjasama keamanan dalam lingkup ASEAN pun tentu tidak hanya dapat dijelaskan melalui pemahaman realisme semata.

ASEAN menerapkan norma bersama yang dikenal dengan *ASEAN way*. Selain itu, perubahan yang terjadi di Cina dan ASEAN mampu mengurai beragam alternatif penjelasan dalam interaksi Cina dengan ASEAN. Dalam ASEAN sangat dimungkinkan terjadinya *intersubjective understanding* dalam setiap penyelesaian kasus keamanan. Hal ini dapat dijelaskan oleh perspektif *constructivist* yang mempercayai konstruksi ide melalui interaksi sosial. Sebagaimana dikemukakan Batabyal (2004, 368) bahwa kemampuan ASEAN untuk membentuk tatanan regional tidak hanya dipengaruhi faktor material seperti *balance of power* dan *self help*, tetapi juga ditentukan oleh *behavioural and procedural norms* dari organisasi ASEAN.

Tulisan ini pun menganalisa sejauh mana *constructivist* dapat menjelaskan keterlibatan Cina dalam kerjasama keamanan ASEAN. Dengan adanya pemahaman dari kedua perspektif ini maka diharapkan dapat terurai sejauh mana kerangka kerja yang konstruktif antara Cina-ASEAN untuk era ASEAN Security Community.

Gambar 1. Cina dan Negara-Negara Anggota ASEAN



Isu Keamanan dalam perspektif ASEAN dan Cina

Usainya Perang Dingin dan Peristiwa 9/11 menjadi momentum kuat bagi pergeseran perspektif keamanan sekaligus format kerjasama keamanan bagi Cina dan ASEAN. Menurut Rüland (2005, 545-546), setelah berakhirnya Perang Dingin mulai muncul beragam tantangan keamanan di Asia Tenggara. Perang antara negara dan bentuk ancaman keamanan konvensional antara negara di Asia Tenggara telah digantikan dengan ancaman keamanan non-konvensional seperti terorisme internasional, kejahatan transnational, separatisme, *piracy*, migrasi, kemiskinan, isu lingkungan, krisis energi, krisis ekonomi, pandemik seperti HIV/AIDS dan SARS serta bencana alam seperti tsunami.

ASEAN juga mengalami evolusi dalam proses pembentukan komunitas kawasan yaitu dengan memperluas ruang lingkup kegiatan bersama (*collective action*) melalui pendalaman kelembagaan serta perluasan keanggotaan, yang menurut Manea (2009, 32-33), tidak saja memperluas wilayah ASEAN tetapi juga tatanan politik, ekonomi dan identitas budaya ASEAN. Proses perluasan ini juga mencakup masuknya negara Indocina sebagai anggota ASEAN (Vietnam, Kamboja, Laos,

Burma/Myanmar). Bahkan ide ini mendorong terbentuknya *East Asian Economic Caucus* yang diusulkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad yang akhirnya terwujud dalam ASEAN+3. Seiring dengan meningkatnya masalah transnasional di antara negara-negara anggota ASEAN maka ASEAN memandang pula pentingnya pemahaman tentang negara-negara yang tercakup sebagai lingkungan eksternal ASEAN. Hal ini terasa sangat penting karena pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan ekonomi di antara negara anggota Asia Tenggara telah meluas pula hingga wilayah Asia Pasifik.

Setelah 9/11, konsep keamanan kembali bergeser dengan mengarah kepada strategi Amerika Serikat (AS) yaitu melawan jaringan terorisme internasional. Intinya, menurut Rüländ (2005, 552), negara-negara Asia Tenggara lebih mengarah kepada strategi AS untuk perang anti teroris. Kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara terhadap jaringan terorisme internasional ditanggapi mereka dengan menempatkan isu terorisme sebagai isu keamanan nasional.

Perluasan isu keamanan juga dirasakan oleh Pemerintah Cina. Kedua momentum yang dirasakan oleh negara-negara Asia Tenggara juga menjadi momentum bagi Cina untuk mempertimbangkan kembali konsep keamanan sekaligus mempertimbangkan kembali pola hubungan dan kerjasama keamanan. Stabilitas keamanan kawasan dan keamanan internasional merupakan hal penting bagi negara power seperti Cina dan juga AS.

Baik ASEAN maupun Cina sama-sama menghadapi dua momentum tersebut sebagai momentum signifikan pada perubahan kebijakan kedua pihak. Apakah karena dorongan dua momentum tersebut akhirnya kedua aktor tersebut bekerjasama? Ataukah karena keduanya saling mempersepsikan ancaman antara satu dengan yang lain?

Tidak diragukan lagi bahwa terdapat ancaman yang dirasakan negara-negara di Asia Tenggara terhadap Cina. Ancaman tersebut bersumbu kepada dua hal yaitu potensi kekuatan ekonomi para etnis Cina yang menyebar serta potensi agresivitas Pemerintah Cina dalam beberapa aspek di tingkat regional maupun internasional.

Beberapa negara anggota ASEAN mempersepsikan bahwa etnis Cina yang hidup di luar wilayah Cina daratan, akan memiliki loyalitas lebih kepada pemerintah Cina bukan kepada pemerintahan negara tempat tinggalnya sendiri. Beberapa etnis Cina yang merupakan etnis minoritas namun terbilang sukses dalam kegiatan bisnis di suatu negara, justru dipandang negatif. Kaum pribumi yang kurang sukses secara ekonomi kemudian mencemburui etnis Cina yang membentuk kelas menengah ini. Menurut Suryadinata (2005, 359-360), Perang Dingin dan kebijakan Pemerintah Beijing baik terhadap gerakan komunis maupun etnis Cina tidaklah membantu menghilangkan kan persepsi negatif ini.

Bahkan, dengan adanya hubungan diplomatik Cina dan ASEAN, kekhawatiran tentang isu etnik Cina ini tidak hilang sama sekali. Negara-negara tertentu bahkan takut apabila hubungan dekat antara Cina dengan negara-negara Asia Tenggara hanya akan menguntungkan Cina daripada mereka sendiri. Satu contoh pernah dilakukan oleh Indonesia masa Orde Baru yaitu melarang etnis China Indonesia untuk berinvestasi di Cina karena melakukan investasi di China dinilai sebagai tindakan yang tidak patriotik. Intinya, banyak pemerintah ASEAN yang melihat investasi Cina sebagai investasi yang tidak sepenuhnya murni didasari oleh bisnis, melainkan ekspresi solidaritas etnisitas. Namun, menurut Suryadinata (2005, 360) persepsi ini justru memudar ketika globalisasi dan krisis ekonomi menerpa Asia. Kebijakan RRC terhadap etnis China telah memperjelas kembali sikap Pemerintah Beijing yang tetap ingin menunjukkan sikap netralnya dalam menghadapi isu etnis Cina baik di tingkat domestik negara-negara Asia Tenggara. Pemerintah Beijing bersikap netral ketika terjadi kerusuhan anti Cina di beberapa negara di Asia Tenggara seperti misalnya Indonesia.

Interaksi Cina dalam Kerjasama Keamanan tingkat ASEAN: Perspektif Realis

Berdasarkan perspektif realis, keterlibatan Cina dalam kerjasama keamanan tingkat ASEAN dapat dijelaskan melalui dua asumsi utama berikut ini.

Pertama, interaksi didorong oleh adanya persepsi ancaman keamanan yang dirasakan Cina dan negara-negara Asia Tenggara. ASEAN memandang Cina sebagai negara yang memiliki *power* besar dengan penduduk yang banyak, sedangkan Cina lebih memandang ASEAN sebagai kekuatan pasar baru bagi negaranya. Dari segi geografis, Gungwu (2005, 4-5) melihat posisi Cina yang dekat dengan India, Pakistan dan Nepal serta Asia Tenggara. Dengan kondisi ini maka tercipta ketergantungan dan keterikatan Cina dengan negara-negara tersebut. Di satu sisi, power ekonomi dan politik Cina dapat menyemangati masyarakat Cina untuk membangun kebanggaan nasional namun di sisi lain hal ini dapat berpotensi melahirkan ketakutan bagi negara tetangganya.

Persepsi ancaman terhadap Cina juga dirasakan oleh AS dan negara-negara besar lainnya. Menurut Liru (2008, 4-5) Barat kurang yakin terhadap sikap Cina yang terlihat penuh cinta damai (*peaceful*). Barat memiliki persepsi ini karena faktor pengalaman sejarah yang meragukan kemurnian motivasi damai dari sikap Cina.

Dengan melihat kondisi tersebut maka terlihat bahwa persepsi buruk dan persepsi ancaman terhadap Cina dirasakan oleh negara-negara di kawasan Asia dan juga oleh AS dan negara maju lainnya. Persepsi yang muncul ini tentu berpotensi

merugikan posisi Cina di dalam hubungan internasional maka tentu perlu dilawan dengan sikap Cina yang perlu membuka lembaran sejarah baru melalui interaksi yang harmonis dengan negara-negara di dalam sistem internasional.

Kedua, interaksi didorong oleh persepsi Cina yang mengkhawatirkan meningkatnya kemitraan AS dengan ASEAN. Persepsi ancaman Cina terhadap eksistensi diri terletak pada meningkatnya intensitas kemitraan ASEAN dengan negara-negara lain terutama dengan AS. Kemitraan ini semakin erat karena adanya komitmen AS untuk memberikan pengaruhnya di Asia baik dalam hal ideologi, isu moral juga perdagangan dan power (Gungwu 2005, 4-5). Selain itu, negara-negara Asia Tenggara pula yang mengharapkan adanya keterlibatan *Great Power* di kawasan dalam rangka dialog dan penerapan *code of conduct* untuk mencegah konflik terkait isu maritime dan kedaulatan misalnya dalam penanganan kasus Laut China Selatan (Odgaard 2003, 11-12).

Cina melihat bahwa kesuksesan ASEAN dalam mengatasi kasus Kamboja misalnya, serta keberhasilan ARF bukan disebabkan oleh norma yang dianut oleh ASEAN atau kesuksesan kelembagaan. Keberhasilan ini dianggap muncul karena dukungan aktor berpower besar (Swee-Hock 2005, 3). Cina melihat adanya peluang bagi dirinya untuk dapat memperluas power melalui pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara.

Pambudi dan Chandra (2006, 33-34) menilai bahwa interaksi Cina dengan ASEAN mampu memberikan Cina lebih banyak kekuatan untuk menandingi pengaruh AS di kawasan ini. Hal ini terbukti dengan adanya dukungan penuh Cina terhadap peluncuran ARF sebagai forum dialog keamanan yang sangat penting di Asia, dan melibatkan ASEAN dan sepuluh mitra dialognya. Cina khawatir bahwa ARF akan digunakan oleh negara-negara Barat untuk mencari dukungan guna menyusun kebijakan mengepung Cina. Namun, kekhawatiran ini dapat ditepis oleh adanya strategi keseimbangan kekuatan ASEAN guna menghalangi kekuatan-kekuatan besar untuk mendominasi kawasan Asia-Pasifik bekerja cukup baik dalam mendukung tujuan keamanan Cina.

Menurut Batabyal (2004, 362), ASEAN melihat ARF sebagai suatu alat untuk menciptakan keterlibatan positif aktor dengan *power* besar seperti Cina dan AS di kawasan. Melalui ARF, ASEAN dapat mendorong *balance of power* yang memungkinkan ASEAN mempertahankan doktrin keamanan operasional tanpa perlu melahirkan *collective defence*. Dengan demikian, pembentukan ARF bukan dikarenakan landasan identitas yang serupa antara Cina, AS dan negara-negara anggota ASEAN.

Interaksi Cina dalam Kerjasama Keamanan ASEAN: Perspektif *Constructivist*

Berdasarkan perspektif *constructivist*, dapat diuraikan keterlibatan China dalam kerjasama keamanan dengan ASEAN melalui dua asumsi sebagai berikut.

Pertama, interaksi didorong oleh kesamaan nilai dan budaya politik antara Cina dengan ASEAN. ASEAN menerapkan *ASEAN way* yang nilainya dianggap sejalan dengan budaya politik Cina. *The ASEAN way* digambarkan sebagai langkah ASEAN yang mengutamakan proses pengambilan keputusan melalui konsultasi mendalam dan *consensus*. *ASEAN way* memungkinkan adanya konsultasi yang mendalam dalam hal keunikan, informalitas, *consensus-building* serta gaya *non-confrontational* yang memberikan karakter terhadap interaksi kawasan dan kerjasama. Karakteristik ini berbeda dengan prosedur pengambilan keputusan di beberapa negosiasi multilateral barat (Batabyal 2004, 356).

Dengan adanya norma tersebut maka tindakan negara anggota ASEAN berdasarkan norma yang mengatur tingkah laku bukan agresivitas. Hal ini tentu menjadi pendorong bagi Cina untuk memilih bekerjasama dengan ASEAN karena dengan norma yang ada tersebut akan mengurangi potensi penggunaan kekuatan yang agresif oleh negara-negara anggota ASEAN. *The ASEAN Way* menekankan betapa *ideas* dan *values* dikonstruksikan oleh ASEAN sebagai identitas para anggotanya.

Lebih jauh, nilai ini sejalan dengan perubahan budaya politik yang terjadi di Cina (Bhalla 2005, 207-218). Perubahan utamanya terlihat pada sikap elite politik China. Perubahan di tubuh partai politik merupakan ekspresi beberapa kelompok masyarakat untuk melakukan reformasi kepada sistem yang lebih terbuka. Untuk mengejar kepentingan Cina di tingkat regional dan internasional, Cina tetap berupaya mempertahankan stabilitas politik domestik dengan menjaga kedaulatan wilayahnya. Untuk mengejar kepentingan ini, maka Cina memaksimalkan kekuatannya dengan menggunakan strategi yang dikenal dengan nama '*calculative strategy*' yaitu mengutamakan interaksi dengan komunitas global dengan terlibat dalam *multilateral organizations*.

Interaksi didorong oleh adanya transformasi internal pemerintah Cina yang mulai terbuka terhadap kerjasama internasional. Transformasi ini dapat dipahami sebagai faktor-faktor *ideational* yang mendasari pemikiran keamanan yang dimiliki Cina. Menurut Xinbo (1998, 155-156), pengalaman Cina terhadap modernitas, kuatnya tradisi budaya, serta ideologi Marxist-Leninist yang dimilikinya, telah membentuk cara pandang Cina mengenai dunia dan tingkah laku Cina di dunia internasional. Dengan hilangnya ancaman musuh militer utama yaitu Uni Sovyet, Cina yang telah mengadopsi konsep *comprehensive security*

lebih mengarahkan kepemimpinannya untuk stabilitas sosial dan unifikasi nasional. Singkatnya, interaksi Cina dengan ASEAN didorong oleh gagasan (*ideas*) keamanan bukan sepenuhnya karena mengejar keuntungan material (*material gain*).

Kedua, interaksi didorong oleh terciptanya identitas “self” dan bukan “other”. ASEAN mengalami evolusi dalam pembentukan komunitas regional dimana terbinanya identitas “self” dan “other”. Hal ini ditunjukkan Manea (2009, 32-45) pada keberhasilan ASEAN berupaya menciptakan identitas kebersamaan antara anggotanya dalam menghadapi permasalahan terkait HAM. *ASEAN Charter* yang disetujui pada 13th ASEAN Summit di Singapura telah mengesahkan pendirian ASEAN Human Rights Body (Dewan HAM ASEAN). Ini menunjukkan bahwa *communicative action* digunakan untuk mengkonsolidasikan dan merumuskan konsep “self”. Pendirian Dewan HAM ini merupakan satu indikator atau penegas bahwa ASEAN menciptakan batasan identitasnya sebagai satu kesatuan.

Selain perluasan isu yang menunjukkan identitas “self” maka terbinanya identitas “self” ini juga dilakukan dengan memperluas keanggotaan ASEAN dan kemitraan atas nama ASEAN. ASEAN *plus three* yang merangkul Cina, Korea Selatan dan Jepang sebagai mitra ASEAN telah menunjukkan bahwa definisi atau batasan “self” dilakukan ASEAN. Interaksi Cina adalah juga atas ‘undangan’ dari ASEAN bukan dari paksaan. Dengan demikian, Cina juga tergolong dalam identitas “self” dengan ASEAN bukan pihak yang dianggap sebagai “other”. Interaksi yang telah terjalin antara Cina dengan negara anggota ASEAN menciptakan konstruksi “self” dan bukan “other”.

Dengan adanya identitas “self” bagi Cina dengan ASEAN maka dimungkinkan bentuk hubungan yang mempermudah adanya *intersubjective understanding* dan *discursive actions* sebagai alat untuk berinteraksi pada isu-isu keamanan tertentu yang diantaranya cukup berat yaitu dalam penyelesaian kasus Laut Cina Selatan.

Penyusunan batasan antara “self” dengan “other” di dalam tubuh ASEAN yang seolah merangkul Cina untuk berinteraksi merupakan faktor pendorong yang penting bagi itnerkasi Cina dalam kerjasama keamanan dengan ASEAN.

Kesimpulan

Interaksi Cina dengan ASEAN dapat dijelaskan dengan perspektif realis dan *constructivist*. Manakah yang paling tepat menggambarkan interaksi yang terjadi selama ini? Pemahaman ini penting guna mendapatkan gambaran tepat mengenai

Cina selaku mitra kerja ASEAN dalam rangka melahirkan rekomendasi kerangka kerja konstruktif Cina-ASEAN di era ASEAN Security Community?

Studi ini menyimpulkan bahwa baik kepentingan material maupun nonmaterial Cina dapat diakomodir melalui interaksinya dengan ASEAN. Interaksi ini dapat menciptakan perubahan identitas Cina di mata negara anggota ASEAN. Namun, asumsi realis untuk bekerjasama yang didasarkan kepada faktor kepentingan material lebih terlihat jelas dalam interaksi Cina dan ASEAN, dibandingkan apabila mendasarkan diri kepada asumsi *constructivist* yang menggunakan dalih interaksi ditentukan karena adanya motif *shared identity* antara Cina dengan ASEAN.

Tulisan ini berpendapat bahwa yang terpenting dalam interaksi ini adalah bagaimana Cina dan ASEAN dapat saling memahami satu yang lain karena di dalam berbagai format agenda kerjasama ASEAN banyak dimungkinkan mekanisme untuk *intersubjective understanding*, tidak sekedar *realist oriented*. Interaksi semacam ini tidak saja menguntungkan Cina tetapi juga ASEAN.

Di satu sisi, dengan interaksi sosial bersama negara ASEAN yang mengadopsi *ASEAN way*, maka Cina dapat membantu pemulihan atas *image* atau identitasnya sebagai negara yang terkesan agresif. Dorongan pemulihan *image* ini juga datang dari dalam negeri Cina (Xinbo 1998, 155-156). Di sisi lain, dengan keterlibatan Cina di ASEAN maka hal ini dapat mengembangkan kapasitas ASEAN dalam menghadapi isu keamanan yang kini meluas tidak saja keamanan militer tetapi juga mencakup keamanan ekonomi.

Faktor-faktor *ideational* dalam motivasi interaksi aktor, seperti yang diungkapkan oleh Batabyal (2004, 368-369), tentu dapat digunakan untuk menjustifikasi tindakan yang sebenarnya dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan material. Perdagangan alat pertahanan di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu contohnya. Pembelian alat-alat pertahanan tersebut tidak saja didorong oleh pertimbangan *prestige* yang diusung oleh pendapat kaum *constructivist*, namun juga karena didukung oleh adanya sikap saling curiga, persaingan dan ancaman di kawasan dan kekuatan di luar kawasan.

Faktor material dan faktor *ideational* dari suatu aktor dalam interaksinya dengan kekuatan regional dapat dipersepsikan sebagai faktor yang mendorong atau sebaliknya merugikan kedua belah pihak. Namun, dalam interaksi Cina dengan ASEAN, potensi untuk saling menguntungkan dan menguatkan dapat tetap terjaga selama negara-negara ASEAN dapat lebih mengembangkan *confidence building* dan *preventive diplomacy* di era menuju *ASEAN Security Community*.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

- Leong, H.K. dan Samuel C.Y. K. eds., 2005. *China and Southeast Asia, Global Changes and Regional Challenges*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Pambudi, D. dan Alexander C.C., 2006. *Garuda Terbelit Naga, Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-China terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Institute for Global Justice.
- Suryadinata, L., 'China and Ethnic Chinese in ASEAN: Post-Cold War Development', Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (eds.), 2005. *ASEAN-China Relations, Realities and Prospects*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Swee-Hock, S., Lijun S., dan Wah C.K., eds., 2005. *ASEAN-China Relations, Realities and Prospects*. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies.
- Wei-cheng, Wang V., 'The Logic of China-ASEAN FTA, Economic Statecraft of "Peaceful Ascendancy"', dalam Ho Khai Leong & Samuel C.Y. Ku (eds.), 2005. *China and Southeast Asia, Global Changes and Regional Challenges*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Xinbo, Wu, 'China, Security Practice of a Modernizing and Ascending Power, dalam Muthiah Alagappa, 1998. *Asian Security Practice, Material and Ideational Influence.*, Standford: Standford University Press.
- Yahuda, M., 1995. *The International Politics of the Asia-Pacific, 1945-1995*, London: Routledge.

Artikel dalam Jurnal

- Batabyal, Anindya, 2004. ASEAN's Quest for Security: A Theoretical Explanation. *International Studies*, **41** (4).
- Liru, Cui, 2008. China's Rise vs. International Order Evolution. *Contemporary International Relations*, **18** (1): 1.
- Madhu, Bhalla, 2005. Domestic Roots of China's Foreign and Security Policy, *International Studies*, **42**: 205-225.

Manea, Maria-Gabriela, 2009. How and Why Interaction Matters, ASEAN's Regional Identity and Human Rights, *Cooperation and Conflict, Journal of the Nordic International Studies Associations*, **44** (1): 27-49.

Rüland, Jürgen, 2005. The Nature of Southeast Asian Security Challenges, *Security Dialogue*, **36** (4): 545-563.

Koran

Lawansiri, P., 2008. Making ASEAN for the People. *The Jakarta Post*, 4 Desember.

Artikel Online

Boyd, Alan, 2009. China adds its might to ASEAN, dalam <http://www.atimes.com/atimes/China/FLO1Ado8.html>. (diakses 11 Maret 2009).